BAB II

PERSPEKTIF TEORITIS

A. Kajian Kepustakaan Konseptual

1. Kajian umum tentang lembaga pemasyarakatan

Pada awalnya tidak dikenal sistem pidana penjara di Indonesia. Sistem pidana penjara baru dikenal pada zaman penjajahan. Pada zaman VOC pun belum dikenal penjara yang seperti sekarang ini, yang ada ialah rumah tahanan yang diperuntukkan bagi wanita tuna susila, penganggur atau gelandangan pemabuk dan sebagainya. Diberikan pula pekerjaan dan pendidikan agama, tetapi ini hanya ada di Batavia terkenal dengan sebutan spinhuis dan rasphuis. Ada 3 macam tempat tahanan demikian yaitu:¹²

- a. Bui yang terdapat di pinggir kota.
- b. Tempat perantaraan (kettingkwartier)
- c. Tempat menampung wanita bangsa Belanda yang melakukan mukah (overspel).

Perbaikan mulai dilakukan pada zaman Inggris (Raffles). Bui-bui yang kecil dan sempit diperbaiki dan didirikan bui dimana ada pengadilan. Perbaikan diteruskan oleh Belanda setelah berkuasa kembali, diadakan klasifikasi:

- a. Kerja paksa dengan sistem rantai
- b. Kerja paksa dengan upah

¹² Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari retrobusi ke reformasi), PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal 92.

Perkembangan kepenjaraan selanjutnya pada permulaan zaman Hindia Belanda dimulai dengan sistem diskriminasi, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan umum untuk golongan bangsa Indonesia (Bumiputera) yang dipidana kerja paksa (Stbld 1826 No.16), sedangkan untuk golongan bangsa Eropa (Belanda) berlaku penjara. Ada 2 macam pidana kerja paksa:

- a. Kerja paksa dimana terpidana dirantai.
- b. Kerja paksa biasa dan mendapat makanan tanpa upah.

Pada masa itu penjara disebut bui sesuai dengan keadaannya sebagai tempat penyekapan, tempat menahan orang-orang yang disangka melakukan kejahatan, orang-orang yang disandera, penjudi, pemabuk, gelandangan dan penjahat-penjahat lain. Karena pada saat itu keadaan bui masih sangat buruk dan menyedihkan, maka dibentuklah panitia untuk meneliti dan membuat rencana perbaikan. Pada tahun 1846 setelah bekerja selama 5 tahun panitia ini mengajukan rencana perbaikan yang tidak pernah dilaksanakan. Diskriminasi perlakuan antara orang pribumi dan orang Eropa (Belanda) sangat menyolok. Perawatan jauh lebih baik dan pekerjaan lebih ringan bagi orang Eropa, begitu pula soal makanan, kondisi kamar penjara dan fasilitasnya jauh lebih baik dari orang pribumi. Pada tahun 1865 Stoet Van Beele berusaha memperbaiki keadaan penjara dengan mengutus residen Riau untuk meninjau sistem penjara di Singapura. Dikeluarkanlah peraturan baru yaitu Stbld 1871 No.28 dengan suatu sistem klasifikasi.

Sistem pengelolaan penjara diperbaiki juga dengan administrasi yang lebih rapi dengan disiplin yang lebih ketat. Pada tahun 1871 itu dirancang pula suatu ordonansi yang berisi perbaikan menyeluruh terhadap sistem penjara, namun rancangan ini tidak pernah terwujud. Antara tahun 1907-1961 dibentuk kantor kepenjaraan (*Gestichten Reglement*) yang tercantum dalam *Stbld* 1917 No.708, mulai berlaku 1 Januari 1918. *Reglemen* inilah yang menjadi dasar peraturan perlakuan terhadap narapidana dan cara pengelolaan penjara. *Reglemen* ini didasarkan pada pasal 29 KUHP (*Wvs*) yang terdiri dari kurang lebih 114 pasal.

Dalam periode antara perang dunia kedua (1918-1942), pada umumnya di Jawa dan Madura ada 3 jenis penjara:¹³

- a. Penjara pusat yang disebut *Centrale Gevangenis Strafgewangenis*. Penjara pusat ini menampung terpidana yang agak berat (lebih dari 1 tahun) disitu terdapat perusahaan yang tergolong besar dan sedang serta perbengkelan.
- b. Penjara negeri yang disebut *Landgevangenis*. Penjara ini berfungsi menampung narapidana yang tergolong ringan (di bawah 1 tahun) pekerjaan yang dilakukan ialah kerajinan dan pekerjaan ringan yang lain serta bengkel-bengkel kecil.
- c. Rumah tahanan yang disebut *Huis van bewaring*. Tempat ini menampung para tahanan terpidana kurungan dan terpidana penjara yang ringan. Disini tidak ada pekerjaan yang pasti.

¹³ Andi Hamzah, *Ibid*, hal 93.

Bagi narapidana anak-anak, pada tahun 1921 telah didirikan ruangan khusus untuk yang berumur dibawah 19 tahun, kemudian didirikan di Tangerang penjara anak-anak untuk yang berumur di bawah 20 tahun dan disusul di Pamekasan dan Ambarawa pada tahun 1927.

2. Kajian Umum tentang Pengertian Narapidana

Sesuai UU No.12 Tahun 1995, pasal 1 angka ke 7 bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak- hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Dr.Sahardjo dalam pidato penganugerahan gelar doctor honoris causa, pada tahun 1963 oleh universitas Indonesia, telah menggunakan istilah nara-pidana bagi mereka yang telah dijatuhi pidana "kehilangan kemerdekaan". Menurut Drs. Ac Sanoesi HAS istilah nara-pidana adalah sebagai pengganti istilah orang hukuman atau orang yang terkena hukuman.¹⁴ Dengan kata lain istilah narapidana adalah untuk mereka yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Kajian umum tentang pembinaan narapidana

a. Pengertian Pembinaan Narapidana

Pengertian pembinaan narapidana menurut PP No 31 Tahun 1999 diatur dalam pasal 1 ayat 1, yaitu : Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada

¹⁴ Pengantar Penologi (ilmu pengetahuan tentang pemasyarakatan khusus terpidana), Penerbit Menara Medan,1976, hal 63

Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Sedangkan menurut Sdr. Bahroedin Soerjobroto pada prinsipnya pembinaan narapidana adalah suatu proses pembinaan untuk mengembalikan kesatuan hidup dari terpidana. Jadi, istilah lembaga pemasarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Iandonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia.¹⁵

4. Teori pembinaan

Sistem pemasarakatan adalah bersatunya kembali Warga Binaan Pemasarakatan dengan masyarakat, sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan Warga Binaan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan. Dalam konteks tersebut diatas sistem pembinaan narapidana dengan orientasi yang berbasis di masyarakat (Community -

¹⁵ Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hal 27.

Based corrections) menjadi pilihan yang efektif dalam sistem pemasyarakatan. Community – Based corrections merupakan suatu metode baru yang digunakan untuk mengintegrasikan narapidana kembali ke kehidupan masyarakat. Semua aktifitas yang mengarah ke usaha penyatuan komunitas untuk mengintegrasikan narapidana ke masyarakat.

Melalui metode Community-based correctionsc memungkinkan Warga Binaan Pemasyarakatan membina hubungan lebih baik, sehingga dapat mengembangkan hubungan baru yang lebih positif. Tujuan utama Community-based corrections ini adalah untuk mempermudah narapidana berinteraksi kembali dengan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penerapan Community-based corrections perlu didasarkan pada standar kriteria sebagai berikut:

- a. Lokasi pembinaan yang memberikan kesempatan bagi narapidana untuk berinteraksi dengan masyarakat.
- b. Lingkungan yang memiliki standar pengawasan yang minimal
- c. Program pembinaan seperti pendidikan, pelatihan, konseling dan hubungan yang didasarkan kepada masyarakat.
- d. Diberikan kesempatan untuk menjalankan peran sebagai wargamasyarakat, anggota keluarga, siswa, pekerja dan lain lain.
- e. Diberikan kesempatan untuk menumbuhkan dan mengembangkan diri.

Penerapan Community-based corrections dapat dilakukan dengan memberdayakan warga binaan pemasyarakatan melalui upaya sebagai berikut:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering) dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.
- c. Memberdayakan mengandung pola melindungi, dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kurang berdaya menghadapi yang kuat.

Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai implementasi dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No: M.03.pr.0703 Tahun 2003 Tanggal 16 April 2003 perihal pembentukan LAPAS Terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak, merupakan pengejawantahan dari konsep Community-based corrections.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka merupakan suatu sistem pembinaan dengan pengawasan minimum (Minimum Security) yang penghuninya telah memasuki tahap asimilasi dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dimana diantaranya telah menjalani setengah dari masa pidananya dan sistem pembinaan serta bimbingan yang dilaksanakan mencerminkan situasi dan kondisi yang ada pada masyarakat sekitar. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menciptakan kesiapan narapidana kembali ke tengah masyarakat (integrasi).¹⁶

Dengan sistem pembinaan yang berorientasi kepada masyarakat maka LAPAS Terbuka seharusnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Tidak ada sarana dan prasarana yang nyata-nyata berfungsi pencegah pelarian (seperti tembok yang tebal dan tinggi, sel yang kokoh dengan jeruji yang kuat dan pengamanan yang maksimal).
- b. Bersifat terbuka dalam arti bahwa sistem pembinaan didasarkan atas tertib diri dan atas rasa tanggung jawab Narapidana terhadap kelompok dimana narapidana tersebut tergolong.
- c. Berada di tengah-tengah masyarakat atau di alam terbuka.

Di dalam melaksanakan suatu pembinaan, secara ilmu pengetahuan dikenal dengan teori Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial yang bertujuan untuk mengembangkan beberapa program kebijakan pembinaan

¹⁶http://hukumham.info/index.php?option=com_content&task=view&id=585&Itemid=43
(10 Juni 2013).

narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Program kebijakan itu meliputi:¹⁷

- a. Asimilasi, dalam asimilasi dikemas berbagai macam program pembinaan yang salah satunya adalah pemberian latihan kerja dan produksi kepada narapidana.
- b. Reintegrasi Sosial Dalam reintegrasi sosial dikembangkan dua macam bentuk program pembinaan, yaitu pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
- c. Pembebasan bersyarat adalah pemberian pembebasan dengan beberapa syarat kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama dua pertiga dari masa pidananya, di mana dua pertiga ini sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan.
- d. Cuti menjelang bebas adalah pemberian cuti kepada narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidananya, di mana masa dua pertiga itu sekurang- kurangnya sembilan bulan.

5. Macam-macam pembinaan

Bentuk-bentuk pembinaan yang diberikan kepada warga binaan saat ini, yaitu:¹⁸

a. Pembinaan Mental

Pembinaan ini merupakan dasar untuk menempa seseorang yang telah sempat terjerumus terhadap perbuatan jahat, sebab pada umumnya orang menjadi jahat itu karena mentalnya sudah

¹⁷ www.media-indonesia.com (3 Juni 2013)

¹⁸ www.Dari Penjara ke Penjara.com (15 Juni 2013)

turun (retardasi mental), sehingga untuk memulihkan kembali mental seseorang seperti sedia kala sebelum dia terjerumus, maka pembinaan mental harus benar-benar diberikan sesuai dengan porsinya.

b. Pembinaan Sosial

Pembinaan sosial ini diberikan kepada warga binaan dalam kaitannya warga binaan yang sudah sempat disingkirkan dari kelompoknya sehingga diupayakan bagaimana memulihkan kembali kesatuan hubungan antara warga binaan dengan masyarakat sekitarnya.

c. Pembinaan Keterampilan

Dalam pembinaan ini diupayakan untuk memberikan berbagai bentuk pengetahuan mengenai keterampilan misalnya bentuk pengetahuan mengenai keterampilan berupa pendidikan menjahit, pertukangan, bercocok tanam dan lain sebagainya. Dalam integrasi sosial dikembangkan dua macam bentuk program pembinaan, yaitu pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

d. Pembebasan bersyarat

Pemberian pembebasan dengan beberapa syarat kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama dua pertiga dari masa pidananya, di mana dua pertiga ini sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan.

e. Cuti menjelang bebas

Pemberian cuti kepada narapidana yang telah menjalani dua per tiga masa pidananya, di mana masa dua pertiga itu sekurang- kurangnya sembilan bulan.

6. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk membangkitkannya. Keberdayaan adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai ketahanan nasional. Memberdayakan masyarakat berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.¹⁹

Istilah “pemberdayaan” adalah terjemah dari istilah asing “empowerment”, secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah pengembangan. Bahkan dalam istilah ini, dalam batas-batas tertentu bersifat *interchangeable* atau dapat dipertukarkan.²⁰

¹⁹ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), hal. 263-264

²⁰ Nanih Machendrawati, Agus Ahmad Syafei, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: Rosda Karya, 2001), hal 41-42

Pemberdayaan adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, upaya itu hanya bisa dilakukan dengan membangkitkan keberdayaan mereka, untuk memperbaiki kehidupan di atas kekuatan sendiri. Asumsi dasar yang dipergunakan adalah bahwa setiap manusia mempunyai potensi dan daya, untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Dengan demikian, pada dasarnya manusia itu bersifat aktif dalam upaya peningkatan keberdayaan dirinya. Dalam rangka pemberdayaan ini upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam kemampuan sumber ekonomi seperti modal, keterampilan, teknologi, informasi dan lapangan kerja, pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar, baik fisik maupun non fisik.²¹

Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi masyarakat yang ada secara evolutif. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh kesinambungan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang asing dalam komunitasnya.²²

Menurut Ife, pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya

²¹ Engking Soewarman Hasan, *Strategi Menciptakan Manusia Yang Bersumber Daya Unggul*, (Bandung: Pustaka Rosda Karya, 2002), hal 56-57

²² K Suhendra, *Peran Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: alfabeta, 2006), hal 74-75

menyangkut kekuasaan politik dalam ari sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

- a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- b. Pendefinisian kebutuhan, kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- c. Ide atau gagasan, kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- d. Lembaga-lembaga, kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
- e. Sumber-sumber, kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
- f. Aktivitas ekonomi, kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang dan jas.
- g. Reproduksi, kemampuan dalam kaitannya dalam proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.²³

Dalam konteks pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo, makro.

²³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, hal. 59

a. Aras Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *street management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

b. Aras Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

c. Aras Makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk

memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.²⁴

Dalam pemberdayaan selain mengarahkan masyarakat untuk berani menguasai diri mereka sendiri tanpa bergantung pada orang lain, tapi kita juga harus mampu untuk membangkitkan keinginan masyarakat secara aktif dan juga mampu untuk meneguhkan komitmen sosial terhadap *stakeholder* agar melakukan sesuatu yang menguntungkan bagi masyarakat yang biasa kita sebut sebagai mobilisasi sosial.

7. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai bagian atau sejiwa sedarah dengan aliran yang muncul pada abad ke-20 yang lebih dikenal dengan aliran post-modernisme. Aliran ini menitik beratkan pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada anti sistem, anti struktur dan antideterminisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Munculnya konsep pemberdayaan merupakan akibat dari reaksi terhadap alam pikiran, tata masyarakat dan tata budaya sebelumnya yang berkembang di suatu negara. Parson menyatakan bahwa konsep power dalam masyarakat adalah variabel jumlah atau kekuatan dalam masyarakat secara keseluruhan yang selanjutnya memiliki tujuan yang kolektif, misalnya dalam pembangunan ekonomi.²⁵

Secara umum, ada empat strategi pengembangan masyarakat, yaitu:

²⁴ Ibid, hal. 66-67

²⁵ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Press, 2006), hal. 1-2

a. *The Growth Strategy*

Penerapan strategi pertumbuhan ini pada umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis, melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk, produktifitas, pertanian, permodalan, dan kesempatan kerja yang dibarengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat, terutama di pedesaan. Pada awalnya strategi ini dianggap produktif. Akan tetapi, karena *economic oriented* sementara kaidah-kaidah hukum sosial dan moral terabaikan maka yang terjadi adalah sebaliknya, yakni semakin melebarnya pemisah kaya miskin, terutama di daerah pedesaan. Akibatnya, begitu terjadi krisis ekonomi maka konflik dan kerawanan sosial terjadi di mana-mana.

b. *The Welfare Strategy*

Strategi kesejahteraan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, karena tidak dibarengi dengan pembangunan kultur dan budaya mandiri dalam diri masyarakat maka yang terjadi adalah sikap ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu, dalam setiap usaha pengembangan masyarakat, salah satu aspek yang harus diperhatikan penanganannya adalah masalah kultur dan budaya masyarakat. Pembangunan budaya jangan sampai kontraproduktif dengan pembangunan ekonomi. Dalam

konteks yang demikian inilah dakwah dengan model pengembangan masyarakat menjadi sangat relevan karena salah satu tujuannya adalah mengupayakan budaya mandiri masyarakat.

c. *The Responsitive Strategy*

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (*self need and assistance*) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang sesuai kebutuhan proses pembangunan. Akan tetapi, karena pemberdayaan masyarakat sendiri belum dilakukan maka strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat ini terlalu idealistik dan sulit ditransformasikan kepada masyarakat. Satu hal yang harus diperhatikan, kecepatan teknologi sering kali, bahkan selalu, tidak diimbangi dengan kesiapan masyarakat dalam menerima dan memfungsikan teknologi itu sendiri. Akibatnya, teknologi yang dipakai dalam penerapan strategi ini menjadi disfungsional.

d. *The Integrated or Holistic Strategy*

Untuk mengatasi dilema pengembangan masyarakat karena kegagalan ketiga strategi seperti telah dijelaskan, maka konsep kombinasi dari unsur-unsur pokok etika strategi di atas

menjadi alternatif terbaik. Strategi ini secara sistematis mengintegrasikan seluruh komponen dan unsur yang diperlukan, yakni ingin mencapai secara simultan tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat.²⁶ Oleh karena itu, dalam strategi ini terdapat tiga prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Persamaan, keadilan, pemerataan, dan partisipasi merupakan tujuan yang secara eksplisit harus ada dari strategi menyeluruh. Sehingga, badan publik yang ditugasi melaksanakan harus:
 - a) Memahami dinamika sosial masyarakat sebagai intervensinya.
 - b) Intervensi dilakukan untuk memperkuat kemampuan masyarakat sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapinya serta untuk mengambil langkah-langkah instrumental yang membutuhkan kemampuan aparatur (pemerintah atau *policy maker*) untuk melakukan intervensi sosial.
- 2) Memerlukan perubahan-perubahan mendasar, baik dalam komitmen maupun dalam gaya dan cara bekerja. Oleh karena itu, badan publik yang belum memiliki

²⁶ Moh. Ali Aziz, Rr. Suhartini, A. Halim, hal. 8-9

kemampuan intervensi sosial akan memerlukan pemimpin yang kuat komitmen pribadinya terhadap tercapainya tujuan dari strategi holistik tersebut, yakni untuk:

- a) Menentukan arah nilai organisasi, energi, dan proses menuju strategi.
 - b) Memelihara integritas organisasi yang didukung oleh *institutional leadership*.
- 3) Keterlibatan badan publik dan organisasi sosial secara terpadu. Dengan demikian, memerlukan suatu pedoman untuk memfungsikan supraorganisasi yang bertugas antara lain:
- a) Membangun dan memelihara perspektif menyeluruh.
 - b) Melaksanakan rekrutmen dan pengembangan kepemimpinan kelembagaan.
 - c) Membuat mekanisme kontrol untuk mengatur saling keterkaitan (*interdependensi*) antara organisasi formal dan informal melalui sistem manajemen strategis.

Untuk menjaga ketiga prinsip tersebut maka dalam strategi itu diperlukan keterlibatan banyak ahli yang bekerja secara profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Atas dasar itu pulalah model dakwah

pengembangan masyarakat juga melibatkan para ahli yang bertindak sebagai fasilitator, sesuai bidang dan profesi masing-masing.²⁷

8. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Guna memahami tentang pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- a. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender maupun etnis.
- b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
- c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan /atau keluarga.²⁸

9. Aset dan Potensi Narapidana

Tiap individu atau kelompok memiliki sumber kekuatan yang terus mempertahankan, mendorong dan mengembangkan diri untuk tetap bertahan. Sumber kekuatan itu yakni individu yang terlibat secara konkret

²⁷ Ibid, hal. 10-11

²⁸ Edi Suharto, hal. 60

dalam merancang kegiatan-kegiatan yang terprogram. Fondasi utama yang menunjang bertahannya sebuah kelompok usaha yaitu tatanan nilai yang menjadi acuan ke arah tujuan yang dibangun bersama. Jika keterlibatan individu dan tatanan nilai minim, maka sulit untuk membentuk atau mempertahankan sebuah individu atau kelompok yang mandiri . Maka, kedua hal tersebut merupakan aset.

Modal Individu yakni bakat, keahlian, talenta, kepribadian, daya nalar, imajinasi, mimpi, keterampilan, kebahagiaan, kecenderungan, tenaga, dan lain-lain. Sedangkan bentuk tatanan nilai ialah kearifan lokal, ketulusan orang-orangnya, serta segala perangkat hidup berupa lingkungan alam, infrastruktur, sistem ekonomi, politik dan budaya. Hal inilah yang menjadi poin penting bagi para praktisi pemberdayaan komunitas berbasis aset-aset.

a. Social Capital (Modal Sosial)

Asset sosial adalah segala hal yang berkenaan dengan kehidupan bersama masyarakat, yaitu baik yang menyangkut potensi-potensi yang ada terkait dengan proses sosial yang positif, maupun realitas sosial yang sudah ada berupa kualitas individu atau kelompok masyarakat untuk menjalin komunikasi dan jejaring sosial di antara mereka.

Pada pengerajin rumah tahanan sendiri kekompakan juga di terapkan. Ada proses saling bantu antara narapidana yang satu dengan narapidana lainnya. Pekerjaan yang dilakukan oleh

narapidana tidaklah murni merupakan hasil pekerjaan sendiri mulai dari adanya pelatihan, penyediaan bahan baku, pencetakan bahan baku, desain, pemasaran, dan lain sebagainya.

Dalam proses pengerjaan pengerajin dari suatu produk membutuhkan beberapa tahapan. Mulai dari awal penyediaan bahan baku sampai ketahap pemasaran. Dalam mempersiapkan semua perlengkapan dan pengerjaan proses produksi, tidak mungkin produksi dilakukan sendiri oleh pengerajin (narapidana) maupun petugas yang ada di dalam Rumah Tahanan. Di dalam proses produksi, ada proses kerja sama antara yang satu dengan yang lainnya. Narapidana yang mengerjakan seperti mebel, Guci pembuatan paving mempunyai keahlian sendiri-sendiri sesuai pelatihan yang diikutinya. Berbagai kemampuan yang dimiliki masing-masing narapidana saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Adanya proses kerja sama yang saling melengkapi antara narapidana yang satu dengan yang lainnya, termasuk dalam aset sosial dari komunitas narapidana.

b. Human Capital (keahlian Individu)

Berdasarkan sumber mata pencaharian narapidana Rumah tahanan kelas I Surabaya sebelumnya terbagi ke dalam beberapa sektor seperti: tukang kayu, bata, pedagang, wirausaha, dan bahkan politikus. Dari beberapa pekerjaan yang

ditekuni narapidana sebelumnya yang paling menonjol adalah wiraswasta. Beberapa narapidana yang lain sebagai pihak pengusaha yang memiliki usaha sendiri.

Mebel adalah sebuah industri rumah tangga yang memiliki orientasi pekerjaan sebagai pembuat bahan-bahan atau alat-alat perlengkapan rumah tangga seperti halnya kursi, lemari, ranjang dipan, bufet dan lain sebagainya. Dari segi kemampuan dan kualitas hasil kerajinan para narapidana sudah diakui oleh kalangan pedagang maupun pengusaha.

Dari segi manusia dan kemampuan individunya, Narapidana memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan sebagai upaya membangun dan mensejahterakan baik bagi dirinya, keluarga dan masyarakat secara umum.

Selain dari keterampilan-keterampilan di atas, masih banyak keterampilan-keterampilan lainnya sebelum menjadi narapidana yang antara satu dengan yang lainnya saling mengisi dan saling melengkapi. Semua keterampilan yang dimiliki oleh narapidana baik sebelum atau sesudah mendapatkan pelatihan di Rumah Tahanan Kelas I Surabaya juga merupakan aset tersendiri yang bisa dijadikan modal untuk membangun, mengembangkan diri secara mandiri dalam proses pemberdayaan.

c. *Physical Capital* (aset fisik)

Narapidana Rumah Tahanan Kelas I Surabaya bisa dikatakan sudah mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan dari tahun ketahun. Bagi Narapidana sendiri pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting. Baik dari lembaga pendidikan yang bersifat formal maupun nonformal. Bagi Masyarakat umum khususnya para narapidana pendidikan bukanlah suatu hal yang asing. Selain sarana dan prasarana sosial tentunya Rumah tahanan juga memiliki infrastruktur yang dapat membantu perkembangan dalam pembinaan narapidana sebagai wujud pemberdayaan.

Pada tahun 2013, tepatnya pada bulan Mei peneliti melakukan pendampingan, sudah terdapat fasilitas-fasilitas pelatihan dan pembinaan. Seperti Aula, perpustakaan, tempat ibadah, tempat pelatihan dan kerajinan tangan beserta peralatan yang sudah tersedia. Adanya infrastruktur sebagai penunjang pembinaan di Rumah Tahanan memberikan pengaruh yang berarti bagi narapidana.

Tabel: I Sarana dan Prasarana peralatan Pengerajin di Rumah tahanan Kelas I Surabaya Tahun 2013

No	Jenis Peralatan	Satuan
1	Maesin Bubut	7 buah
2	Molen	2 buah
3	Mesin Bor	19 buah
4	Mesin Pemotong Kayu	5 buah
5	Mesin Cetak (Guci)	11 buah
6	Gergaji Manual	36 buah
7	Hammer	28 buah
8	Alat Ukur	34 buah
9	Alat Cetak (paving)	3 buah
Jumlah		Buah

Sumber: Data sekunder Rumah tahanan Kelas I Surabaya, Juni, 2013

10. Identifikasi *Power* (Kekuatan) Narapidana

Istilah Pemberdayaan (*empowerment*), tidak bisa dilepaskan dari kata *power*, yang di artikan sebagai *ability to do or act* atau kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak. Menurut Weber dalam Harry hikmat mendefinisikan *power* sebagai kemampuan seseorang/ individu/ kelompok untuk mewujudkan keinginan, kendatipun terpaksa menentang lainnya.²⁹ Dalam dimensi pembangunan Robet Chamber konsep ini menjelaskan bahwa *power* yaitu: daya dari dalam *power from within* yang

²⁹ Harry hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, 2010) cet. Ke-5, hal.2

juga dikenal sebagai (daya personal) *power to* (daya untuk melakukan sesuatu), *power with* (kemampuan dalam melakukan kerja sama), *power over* (kemampuan/daya untuk mempengaruhi). Dalam konteks narapidana perlu kiranya untuk mengungkap sumber kekuatan yang ada pada narapidana. (Kekuatan/daya) *power* inilah sebagai modal dalam melakukan pendampingan dan perubahan.

a. *Power within* (kesadaran untuk berdaya)

Kesadaran dapat dikategorikan sebagai kekuatan yang paling dasar dan utama dari semua kekuatan yang dapat dimiliki oleh individu, komunitas maupun kelompok tertentu. Dengan kesadaran yang dimiliki oleh individu/kelompok merupakan modal awal mobilisasi atau perubahan dilakukan dalam proses pendampingan.

Dalam konteks Narapidana, kekuatan dari dalam (*power within*) ini sudah mereka miliki. Sebelum pendampingan dilakukan narapidana sudah mengerti dan sadar dengan situasi dan kondisi yang dialaminya. Sebagai narapidana, sudah memahami betul apa yang ada dalam konteks dirinya. Banyak kekurangan yang perlu dibenahi dari komunitas tersebut. Salah satu contoh dalam strategi pembinaan narapidana di Rumah Tahanan menurut Kholik, pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian hukum dan HAM belum maksimal, artinya pembinaan yang dilakukan dalam pemberdayaan narapidana sebagai wujud kemandirian dan modal individu narapidana

setelah bebas yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selain itu pengelolaan SDM narapidana masih lemah.³⁰

Tidak hanya *power* untuk menyadari keadaannya saja, narapidana pada dasarnya punya daya untuk melakukan perubahan yang tentunya ke arah yang lebih baik. Daya personal atau *power within* ini juga dimiliki oleh sebagian besar narapidana. Terkadang kesadaran dalam individu atau kelompok tertentu hanyalah kenyataan yang ada. Artinya kesadaran yang dimiliki tidak ada reaksi apapun terhadap kondisi yang dialami saat itu. Dengan kondisi yang demikian merupakan momen yang cocok di mana pendampingan dilakukan.

b. Power with (kemampuan dalam menjalin kerja sama)

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial artinya manusia atau individu tidaklah lepas dari individu yang lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak melakukannya sendiri, begitu juga manusia atau individu yang lainnya. Kebutuhan pada diri manusia bermacam-macam; ada kebutuhan ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan, agama dan lain sebagainya. Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan manusia/ individu maupun kelompok manusia membutuhkan kerja sama antara yang satu dengan yang lainnya.

³⁰ wawancara dengan bapak kholik, narapidana Rumah tahanan Kelas I Surabaya 2 Juni 2013

Kerja sama adalah manifestasi dari diri manusia yang bersifat sosial. Hal ini berlaku bagi masyarakat di manapun termasuk pada narapidana di Rumah tahanan Kelas I Surabaya. Dari cerita beberapa narapidana merupakan masyarakat yang kompak dan ramah. Terbukti dahulu banyak narapidana mengikuti sebuah organisasi yang mewadahi. Adanya dua kelompok tersebut menandakan, *power with* (kemampuan dalam menjalin kerja sama) pada dasarnya dimiliki oleh narapidana. Akan tetapi berdasarkan informasi yang diperoleh, KUN akhirnya bubar yang disebabkan oleh adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kelompok.

Bubaranya Kelompok Usaha Narapidana yang sudah di jelaskan di atas menyisakan luka pada narapidana yang sekarang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Mereka merasa dijadikan alat oleh oknum tertentu untuk mendapatkan misi yang mereka inginkan dari adanya kelompok tersebut. Permasalahan yang dialami oleh narapidana bukanlah sebuah *blame* batu penghalang pada diri mereka untuk bekerja sama, akan tetapi hanya rasa percaya (kepercayaan) mereka ternodai oleh kepentingan.³¹

Keinginan dari beberapa narapidana untuk membentuk sebuah persatuan atau kelompok yang peduli terhadap

³¹ Wawancara dengan Pak Matali salah satu narapidana yang sudah 6 tahun 8 bulan di Rumah Tahanan Kelas I Surabaya, pada tanggal 10 Juni 2013.

perkembangan dan nasib pengerajin di Rumah tahanan. Mereka mempunyai semangat juang yang tinggi untuk kerajinan dan kreatifitasnya sebagai aset yang dimiliki. Langkah pasti dari proses pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan petugas rumah tahanan menyusun rencana, menggalang massa yakni narapidana dan pihak swasta untuk bekerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan kapasitas skill narapidana di Rumah tahanan.

Kerja sama ini tidak hanya berada pada konteks internal narapidana. Narapidana juga mempunyai peluang untuk melakukan kerja sama dengan pihak luar dalam rangka mengembangkan sentra pemasaran hasil kerajinannya. Pemerintah dalam hal ini kementerian hukum dan HAM adalah orang-orang yang mempunyai potensi besar untuk melakukan kerja sama dan membangun jaringan dengan pihak luar. Tidak hanya itu mereka juga sudah mempunyai pengalaman yang luas dalam masalah kerja sama baik pada pihak pemerintah maupun pada pihak swasta demi masa depan Narapidana.

c. *Power to* (kemampuan untuk melakukan sesuatu)

Power to mengacu kepada kapasitas untuk mengambil tindakan. Daya/kekuatan ini menekankan kapasitas generatif produktif dari individu dan memiliki tiga tujuan yang saling berkaitan yang dimaksud sebagai pembebasan, partisipatif, dan mobilisasi perubahan.

Pembebasan di sini adalah upaya atau kekuatan dari individu atau kelompok dengan tindakan tertentu untuk melepaskan diri dari situasi maupun kondisi yang menekan, mengurung mereka pada kondisi ketidakberdayaan. Sedangkan partisipatif adalah peran serta individu atau kelompok bagaimana proses pemberdayaan dan pendampingan dilakukan guna memobilisasi, khususnya narapidana di Rumah tahanan ke situasi kondisi yang lebih baik.

Semangat pembebasan adalah kunci penting dari sebuah individu atau kelompok melakukan perubahan. Tidak hanya semangat pembebasan yang dibawa oleh orang luar (pendamping), akan lebih kuat apabila semangat pembebasan muncul dari narapidana itu sendiri. Kebebasan yang diinginkan bukan kebebasan dari misi orang yang melakukan pendampingan, melainkan kebebasan untuk mendapatkan hak itulah diperjuangkan. Keberadaan pihak luar memang sangat penting sebagai pihak pendorong maupun penggerak dalam proses perubahan. Lebih penting lagi dari pihak dalam dibutuhkan juga kekuatan sebagai partisipasi dan kerja sama dalam melakukan perubahan yang dimaksud dengan *power to* (kekuatan untuk melakukan sesuatu). Kerja sama antara dua belah pihak adalah sebuah yang sangat berarti dalam proses pemberdayaan atau perubahan.

Dalam proses pendampingan dan pembinaan narapidana sudah menemukan kekuatan daya dari *power to* ini. Ada upaya dari mereka untuk melakukan sesuatu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan narapidana. Bentuk yang paling konkrit ditunjukkan dengan adanya perencanaan pembentukan kelompok baru. Selain itu petugas dan narapidana harus berpegangan tangan bersatu dalam mengembangkan potensi dalam diri masing-masing untuk menginginkan dan mendapatkan kesejahteraan dari apa yang sudah dilakukan. Langkah dan gerak yang di tempuh oleh para napi ini merupakan *power to* yang ada pada diri individu atau kelompok narapidana di Rumah tahanan Kelas I Surabaya.

d. *Power over* (kemampuan untuk mempengaruhi).

Kunci dari kekuatan ini adalah rasa percaya diri dan kepercayaan dari individu atau kelompok narapidana. Rasa percaya diri memberikan semangat bagi narapidana untuk melakukan sebuah perubahan yang tentunya ke arah yang lebih baik. Sedangkan kepercayaan adalah sikap terbuka dan percaya yang satu dengan yang lainnya dengan tidak ada rasa curiga dan iri, maupun rasa dendam terhadap narapidana atau pembina.

Kunci penting dalam proses pendampingan adalah kembalinya rasa percaya diri sebuah kelompok. Selain rasa percaya diri, kepercayaan antar yang satu dengan yang lainnya

juga perlu dikembalikan. Dengan kembalinya kepercayaan tersebut sangat mudah untuk mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya.

Kekuatan atas (*power over*) merupakan kekuatan bertahan atau kekuatan individu untuk mengontrol atau menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat kecil, seperti dalam rumah tangga, masyarakat dan makro. Daya ini bisa negatif karena melawan seseorang atau kelompok untuk melakukan sesuatu melawan keinginannya. Akan tetapi daya ini juga berdampak positif sebab melampaui kondisi dominan dan struktur yang tidak sama.

Pada kenyataannya, narapidana tetap harus berjuang untuk menjadi yang lebih baik hingga sekarang. Keberadaan narapidana yang saling mempengaruhi atau pengaruh dari narapidana ke narapidana lain berjalan terus-menerus. Hal yang demikian menandakan bahwa sebagian besar narapidana memiliki daya untuk mempengaruhi, atau daya atas untuk menghadapi tantangan dan hambatan usaha yang dijalani.

11. Pengorganisasian Masyarakat

Istilah pengorganisasian rakyat (*people organizing*) atau juga yang lebih dikenal dengan istilah “pengorganisasian masyarakat” (*community organizing*) sebenarnya adalah suatu pengistilahan yang sudah menjelaskan dirinya sendiri. Istilah ini memang mengandung pengertian yang lebih luas dari kedua akar katanya. Istilah rakyat di sini tidak hanya mengacu pada

suatu perkauman (*community*) yang khas, dan dalam konteks yang lebih luas, juga pada masyarakat (*society*) pada umumnya. Istilah pengorganisasian di sini lebih diartikan sebagai suatu kerangka proses menyeluruh untuk menyelesaikan permasalahan tertentu di tengah rakyat. Sehingga, bisa juga diartikan sebagai suatu cara pendekatan yang disengaja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka memecahkan berbagai masalah masyarakat tersebut.³²

Menurut Murray G. Ross, dalam bukunya Abu Hurairah menjelaskan bahwa pengorganisasian masyarakat adalah suatu proses ketika suatu masyarakat berusaha menentukan kebutuhan-kebutuhan atau tujuannya, mengatur atau menyusun, mengembangkan kepercayaan dan hasrat untuk memenuhinya, menentukan sumber-sumber (dari dalam atau luar masyarakat), mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, dan dalam pelaksanaan kebutuhan-kebutuhannya, memperluas dan mengembangkan sikap-sikap dan perilaku praktik-praktik.³³

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian masyarakat adalah suatu proses penentuan dalam memecahkan suatu masalah yang terjadi di tengah masyarakat, dan dalam proses tersebut seorang pengorganisir harus serta merta melibatkan masyarakat tersebut. karena seorang pengorganisir masyarakat dapat dikatakan berhasil jika sang

³² Jo Han Tan & Roem Topatimasang, *Mengorganisir Rakyat, Refleksi Pengalaman Pengorganisasian Rakyat Di Asia Tenggara*, (Yogyakarta: SEAPCP, 2003), hal. 5

³³ Abu Hurairah, *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, (Bandung: Humaniora, 2011), hal. 143

pahlawan adalah masyarakat itu sendiri dan bukannya sang pengorganisir lain yang berasal dari masyarakat tersebut.

Jika seorang pengorganisir tersebut memang berasal dari kalangan masyarakat setempat itu sendiri, ia akan mukim dan tetap akan hidup di tengah masyarakatnya, tidak lagi secara langsung melakukan peran-peran pengorganisasian apapun, tetapi memusatkan perhatian mendidik dan mengembangkan organisir-organisir baru, lapisan kedua dan lapisan ketiga. Sehingga, membangun suatu mekanisme internal di kalangan rakyat di sana yang melanjutkan tradisi pengorganisasian mereka.³⁴

a. Tujuan pengorganisasian masyarakat

Tujuan mengorganisir rakyat adalah menghapuskan semua ketidakadilan dan penindasan. ketidakadilan dan penindasan dapat dilakukan oleh siapapun baik pemerintah ataupun orang-orang yang menganggap diri mereka berkuasa sehingga melakukan tindakan tersebut. dengan banyaknya ketidakadilan dan penindasan yang terjadi, banyak pula orang yang hanya duduk dan menyaksikan hal tersebut, atau bahkan mereka merasa terganggu dan mengatakan ketidaksetujuannya, tapi kembali lagi mereka tidak mampu membuat apa-apa, sehingga, ketidakadilan dan penindasan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat semakin meningkat dan bertambah parah.

Dari sanalah kita dapat melihat apa yang landasan dan tujuan seorang pengorganisir dalam melakukan

³⁴ Jo Han Tan & Roem Topatimasang, hal. 5

pengorganisasian masyarakat, apakah mereka mampu mencapainya atau tidak. pengorganisasian masyarakat juga sama sekali tidak netral. Tetapi, sarat dengan pilihan-pilihan nilai, kaidah asa, keyakinan dan pemahaman tentang masyarakat dan bagaimana agar keadilan, perdamaian dan hak asasi manusia ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.

b. Proses pengorganisasian masyarakat

Proses pengorganisasian masyarakat akan dapat dilihat apabila seseorang tersebut terjun langsung dan melihat masalah tersebut secara langsung, yang mana akan terlihat masalah, isu, keadaan yang sesuai dengan konteks sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lain-lain. satu kata kunci proses pengorganisasian masyarakat adalah memfasilitasi mereka sampai akhirnya mereka dapat memiliki suatu pandangan dan pemahaman bersama mengenai keadaan dan masalah yang mereka hadapi.

Proses pengorganisasian masyarakat berlangsung terus sebagai suatu daur yang tidak pernah selesai. Mulai dari rakyat sendiri. Ajak mereka berpikir kritis. Lakukan analisis ke arah pemahaman bersama. Capai pengetahuan, kesadaran, dan perilaku baru. Lakukan tindakan. Evaluasi tindakan tersebut.³⁵

Mengorganisir masyarakat berarti juga membangun dan mengembangkan suatu organisasi yang didirikan, dikelola, dan

³⁵ Ibid, hal. 10

dikendalikan oleh masyarakat setempat sendiri, dan membangun organisasi masyarakat dalam pengertian ini juga membangun dan mengembangkan suatu struktur dan mekanisme yang menjadikan mereka sebagai pelaku utama semua kegiatan organisasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan tindak lanjut. Bahkan sejak awal sebenarnya struktur dan mekanisme itu harus dibentuk oleh masyarakat setempat sendiri karena proses-proses pengorganisasian masyarakat mutlak harus mengupayakan dan menjadikan rakyat itu sendiri pada akhirnya sebagai pelaku utama.³⁶

c. Tugas dan peran pengorganisir masyarakat

Tugas dan peran seorang pengorganisir masyarakat adalah memfasilitasi agar seluruh proses penuh pertentangan tersebut tetap ditonton secara jelas dan lengkap oleh masyarakat, yang atas dasar penyaksian mereka sendiri, akhirnya mampu melakukan tindakan-tindakan bersama untuk menghadapinya sesuai dengan keadaan dan kemampuan masyarakat. Dalam arti lain, tugas seorang pengorganisir masyarakat adalah memfasilitasi masyarakat. Tetapi dalam tindakan, masyarakat sendirilah yang akan bertindak sesuai dengan kemampuan mereka dan juga berdasarkan masalah-masalah yang terjadi pada lingkungan mereka.

³⁶ Ibid, hal. 122

Peran dan tanggung jawab yang ditekankan oleh mereka yang terlibat dalam proses pengorganisasian harus dirumuskan se jelas mungkin:

- 1) Berperan sebagai orang lapangan, yang melakukan kerja-kerja langsung di tengah rakyat (*ground work*).
- 2) Berperan menjalankan di garis depan (*frountline*), mereka adalah juru runding, juru bicara, yang mana berurusan dengan pemerintah atau politisi melalui lobi-lobi, dan dengan kalangan media massa untuk keperluan kampanye atau penyebaran informasi, dan mereka adalah yang menjalankan advokasi kebijakan.
- 3) Berperan sebagai pendukung (*supporting*), dengan berbagai keterampilan khusus seperti pencari dana, penyedia bahan-bahan dan pembekalan, peneliti, dll.

Satu hal yang perlu diketahui oleh seorang pengorganisir masyarakat, yakni kerja kerelawanan (*voluntarism*), mengorganisir masyarakat, sekali lagi bukanlah lapangan pekerjaan untuk mencari nafkah. Akan tetapi pengorganisasian masyarakat di manapun selalu menunjukkan bahwa orang terlibat di dalamnya lebih karena dorongan komitmen semacam kepuasan batin (*passion*).³⁷

B. Landasan Teori

1. Teori Advokasi

³⁷ Ibid, hal. 99

Dalam pemberdayaan Narapidana dibutuhkan perlindungan agar dapat terhindar dari kekerasan maupun diskriminasi. Salah satu perlindungan tersebut adalah advokasi. Advokasi adalah upaya terencana dan terorganisir untuk mendesakkan perubahan dengan cara mempengaruhi para pengambil keputusan, khususnya saat mereka mengambil keputusan dalam menetapkan peraturan perundang -undangan mengatur sumber daya, dan mengambil kebijakan menyangkut kelompok komunitas atau masyarakat (atau dikenal dengan sebutan : kebijakan publik). Titik beratnya adalah pada tujuan yang hendak dicapai, yaitu perubahan kebijakan menyangkut kepentingan sebagai masyarakat.³⁸

Ada yang berpendapat bahwa advokasi adalah aksi strategis yang ditujukan untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yang diperkirakan merugikan masyarakat.³⁹

Advokasi sendiri terdiri atas sejumlah tindakan yang dirancang untuk menarik perhatian masyarakat pada suatu isu, dan mengontrol para pengambil kebijakan untuk mencari solusinya. Dengan kata lain, advokasi kebijakan sebenarnya hanyalah salah satu dari perangkat sekaligus proses-proses demokrasi yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk

³⁸ Valentina Sagala, *Advokasi Perempuan Akar Rumput*, (Bandung : Institut Perempuan. 2011), hlm. 3

³⁹ Sheila Espine, *Manual Advokasi Kebijakan Strategis*, (Jakarta : Ameenpro.2004), hlm. 28

mengawasi dan melindungi kepentingan mereka dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah.⁴⁰

Edi Suharto dalam makalahnya “Filosofi dan Peran Advokasi dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat”, 2006, menulis bahwa istilah advokasi sangat lekat dengan pembelaan. Karenanya tidak heran jika advokasi seringkali diartikan sebagai “kegiatan pembelaan kasus atau pembelaan di pengadilan”. Dalam bahasa Inggris *to advocate* tidak hanya berarti *to defend* (membela), melainkan pula *to promote* (memajukan), *to create* (menciptakan) dan *to change* (melakukan perubahan).⁴¹

Berpijak pada literatur pekerjaan sosial, advokasi dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu :

a. Advokasi Kasus

dalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Dengan alasan, terjadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis atau kelompok profesional terhadap klien, dan klien sendiri tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik. Pekerja sosial berbicara, berargumentasi dan bernegosiasi atas nama klien individu atau kelompok.

⁴⁰ Roem Topatimasang, *Merubah Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2000), hlm. 29

⁴¹Ruli Hasan, *Sekilas Tentang Teori Advokasi* (<http://www.pusaka-community.org/2010/01/sekilas-tentang-teori-advokasi6241.html>, diakses pada Senin 14 Mei 2012)

Karenanya, advokasi sering disebut pula sebagai advokasi klien (*client advocacy*).

b. Advokasi Kelas

Advokasi kelas melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang berkuasa. Pekerja sosial biasanya bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi, bukan sebagai seorang praktisi mandiri. Advokasi kelas umumnya dilakukan melalui koalisi kelompok atau komunitas dan organisasi lain yang memiliki agenda sejalan.

2. Teori Proses

Proses adalah kata yang berasal dari bahasa latin "*processus*" yang berarti "berjalan kedepan". Kata ini mempunyai konotasi urutan langkah atau kemajuan yang mengarah pada suatu sasaran atau tujuan. Menurut Chaplin, proses adalah *any change in any object or organism particularly a behavioral or psychological change* (proses adalah perubahan yang menyangkut tingkah laku atau kejiwaan).

Dalam psikologi belajar, proses berarti cara atau langkah khusus yang dengannya beberapa perubahan ditimbulkan hingga tercapainya hasil-hasil tertentu. Jadi proses belajar dapat diartikan sebagai tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif dan psikomotor yang terjadi dalam diri siswa. perubahan itu positif dalam arti berorientasi kearah yang lebih

maju dari pada keadaan sebelumnya.⁴² Yang berkenaan dengan teori proses adalah sebagai berikut:

a. Equity Theory (S. Adams)

Inti teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Artinya, apabila seorang pegawai mempunyai persepsi bahwa imbalan yang diterimanya tidak memadai, dua kemungkinan dapat terjadi, yaitu:

- 1) Seorang akan berusaha memperoleh imbalan yang lebih besar.
- 2) Mengurangi intensitas usaha yang dibuat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

b. Expectancy Theory (Victor Vroom)

Victor Vroom mengembangkan sebuah teori motivasi berdasarkan kebutuhan internal, tiga asumsi pokok Vroom dari teorinya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap individu percaya bahwa bila ia berperilaku dengan cara tertentu, ia akan memperoleh hal tertentu. Ini disebut sebuah harapan hasil (outcome expectancy) sebagai penilaian subjektif seseorang atas kemungkinan bahwa

⁴² Tersedia di <http://sandy-pradipta.blogspot.com>. teori-proses-pengelolaan. html, di akses tanggal 29 Juni 2013

suatu hasil tertentu akan muncul dari tindakan orang tersebut.

- 2) Setiap hasil mempunyai nilai, atau daya tarik bagi orang tertentu. Ini disebut valensi (valence) sebagai nilai yang orang berikan kepada suatu hasil yang diharapkan.
- 3) Setiap hasil berkaitan dengan suatu persepsi mengenai seberapa sulit mencapai hasil tersebut. Ini disebut harapan usaha (effort expectancy) sebagai kemungkinan bahwa usaha seseorang akan menghasilkan pencapaian suatu tujuan tertentu.⁴³

3. Teori Pendampingan

Dikalangan dunia pengembangan masyarakat, istilah pendampingan merupakan istilah baru yang muncul sekitar tahun 1990-an. Sebelum itu istilah yang banyak dipakai adalah “pembinaan”. Ketika istilah pembinaan ini dipakai terkesan ada tingkatan yaitu ada pembina dan yang dibina, pembinaan adalah orang atau lembaga yang melakukan pembinaan sedangkan yang dibina adalah masyarakat.⁴⁴

Kesan lain yang muncul adalah pembinaan sebagai pihak yang aktif sedang yang dibina pasif atau pembinaan adalah subjek, sedangkan yang dibina adalah objek. Oleh karena itu istilah pendampingan dimunculkan, langsung mendapat sambutan positif dikalangan praktisi pengembangan masyarakat. Karena kata pendampingan menunjukkan

⁴³Tersedia di <http://kodokoala.blogspot.com>. *Penjelasan-Tentang-Motivasi-Teori-Teori.html*. di akses tanggal 29-Juni 2013

⁴⁴Riski Aditya, *Pengertian Teori Pendampingan* (<http://www.bintan-s.web.id/2010/12/pengertian-pendampingan.html>, diakses, Senin 14 Mei 2012)

kesejajaran, yang aktif justru yang didampingi sekaligus sebagai subjek utamanya, sedang pendamping lebih bersifat membantu saja. Dengan demikian, pendampingan dapat diartikan sebagai satu interaksi yang terus menerus antara pendamping dengan anggota kelompok atau masyarakat hingga terjadilah proses perubahan kreatif yang diprakarsai oleh anggota kelompok atau masyarakat yang sadar diri dan terdidik.

Selama ini, jika orang-orang berbicara soal pendampingan, mereka menandainya dalam dua kutub yang saling bertentangan, yakni : pendampingan otokratis (bersifat serba mengarahkan dan memerintahkan) di satu sisi, dan pendampingan demokratis (bersifat mendorong dan mendukung). Pendampingan otokratis didasarkan pada kedudukan pemilikan kekuasaan dan kewenangan, sementara pendampingan lebih dikaitkan dengan kekuatan pribadi dan peran serta anggota yang dipimpin dalam proses pemecahan masalah dan pembuatan keputusan.

Sedangkan perilaku pendamping ada dua yakni mengarahkan dan mendorong. Perilaku mengarahkan atau *Directive Behaviour* diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seorang pendamping dalam bentuk komunikasi satu arah : menjelaskan peran masyarakat dan memerintahkan kepada masyarakat apa yang mesti mereka kerjakan, dimana mereka harus mengerjakannya, kapan, dan bagaimana caranya serta melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan dan hasil kerja masyarakat tersebut.

Perilaku mendorong atau *Supportive Behaviour*, diartikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang pendamping dalam bentuk komunikasi dua arah, lebih banyak mendengarkan saran dan pendapat masyarakat, memberikan banyak dukungan dan dorongan semangat, memperlancar dan mempermudah terjadinya hubungan antar setiap orang, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Twelvetrees yang dikutip dalam buku Edi Suharto membagi perpektif teoritis pemberdayaan masyarakat ke dalam dua bingkai, yakni pendekatan profesional dan pendekatan radikal.

Pendekatan profesional menunjuk pada upaya untuk meningkatkan kemandirian dan memperbaiki pembagian layanan dalam kerangka relasi-relasi sosial. Sedangkan pendekatan radikal lebih terfokus pada upaya mengubah ketidak seimbangan relasi- relasi sosial yang ada melalui pemberdayaan-pemberdayaan kelompok lemah, mencari sebab sebab kelemahan mereka, serta menganalisis sumber-sumber ketertindasan. Pendekatan profesional dapat diberi label sebagai pendekatan yang bermatra tradisional, netral, dan teknikal. Sedangkan pendekatan radikal dapat diberi label sebagai pendekatan yang bermatra transformasional.

Perspektif Pengembangan Masyarakat Pendekatan Perspektif Tujuan atau Asumsi Profesional (Tradisional, Netral, Teknikal) yaitu;

- a. Perawatan masyarakat
- b. Pengorganisasian masyarakat
- c. Pembangunan masyarakat

- d. Meningkatkan inisiatif dan kemandirian masyarakat.
- e. Memperbaiki pemberian pelayanan sosial dalam rangka relasi sosial yang ada.

Sedangkan perspektif pengembangan masyarakat dengan pendekatan Radikal (Transformasional).

- a. Aksi masyarakat berdasarkan kelas.
- b. Aksi masyarakat berdasarkan gender.
- c. Aksi masyarakat berdasarkan ras.
- d. Meningkatkan kesadaran dan inisiatif masyarakat.
- e. Memberdayakan masyarakat guna mencari akar penyebab ketertindasan dan diskriminasi.
- f. Mengembangkan strategi dan membangun kerjasama dalam melakukan perubahan sosial sebagai bagian dari upaya mengubah relasi sosial yang menindas, diskriminatif, dan eksploitatif.⁴⁵

4. Teori ABCD (Asset based Community Development)

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses siklus terus menerus. Proses partisipasi di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun non formal. Untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta usaha mencapai tujuan bersama. Jadi pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses, baik proses itu dilakukan secara individu ataupun oleh kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat.

⁴⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Ibid., hal. 40

Pada proses pembinaan dan pemberdayaan narapidana, pembinaan mengacu pada teori ABCD (Asset Based Community Development) yang menitik beratkan pada Asset-asset yang dimiliki oleh masyarakat atau kelompok tertentu. Teori ini berasumsi bahwa yang dapat menjawab problem masyarakat adalah masyarakat sendiri dan segala usaha perbaikan ini harus dimulai dari perbaikan modal sosial.⁴⁶

Pemberdayaan yang menitik beratkan pada aset memandang bahwa masyarakat tidak terlepas dari keistimewaan yang dimilikinya, baik potensi atau masalah selalu saja menggeluti dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Salah satunya adalah aset dalam masyarakat. Dalam hal ini aset bisa berbentuk sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh lapisan masyarakat. Di dalam aset ini ada modal sosial yang bisa dikembangkan oleh masyarakat. Dari sinilah bisa diketahui potensi yang harus dikembangkan oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Adapun konsep dari teori ABCD dimulai dari dua aspek, yakni *neighborhood of Seed* kebutuhan masyarakat sekitar dan *neighborhood of Asset* (aset masyarakat sekitar). Dalam arti setiap masyarakat pasti memiliki kebutuhan dan Asset, begitu pula setiap individu atau kelompok memiliki masalah namun di sisi lain terdapat juga potensi yang bisa mengatasinya.

Pemberdayaan berbasis aset ini mengidentifikasi dan mengintegrasikan aset lokal kelompok yang terdiri dari individu atau

⁴⁶ Jhon McKnight, *The Careless Society: The Community and Its Counterfeits* (New York; Basic Books, 2010), hal. 46

kelompok sekitar (masyarakat) baik muda maupun tua, dalam sebuah organisasi baik formal maupun informal contohnya remaja masjid, PKK, kelompok pengerajin, kelompok usaha atau pekerja dan lain sebagainya. Selain itu yang bisa dipandang sebagai aset masyarakat berupa fasilitas-fasilitas pelayanan atau infrastruktur.

C. Pendampingan Terdahulu yang Relevan

Tabel 2

Kajian pendampingan terdahulu 1

No	Nama	Judul pendampingan	Fokus pendampingan	Temuan
1		Upaya Panti Asuh Aisyathong Mariyam dalam mengembangkan kualitas SDM pada anak panti Diperlis Selatan Perak Timur.	1. Bagaimana strategi pemberdayaan serta peran Panti Asuh Aisyathong Mariyam dalam mengembangkan kualitas SDM pada anak panti? 2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat	1. Skripsi ini menjelaskan tentang upaya panti asuhan Aisyathong Mariyam dalam mengembangkan kualitas SDM dan diimplementasikan rasa keadilan dan peningkatan taraf hidup secara komprehensif terhadap anak asuhnya yang khususnya bagi anak yatim piatu. 2. Terfasilitasinya paguyuban untuk saling tukar informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

			<p>pemberdayaan masyarakat khususnya dalam peningkatan kualitas SDM</p>	
--	--	--	---	--

Tabel 3

Kajian pendampingan terdahulu 2

NO	Nama	Judul pendampingan	Fokus pendampingan	Temuan
1		Peran Kantor Sosial Gresik Dalam pendampingan dan Pemberdayaan Mantan Napi	<p>1. Bagaimana peran Kantor Sosial Gresik dalam strategi pemberdayaan Mantan Narapidana</p> <p>2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam proses pemberdayaan tersebut</p>	<p>1. pemberdayaan dengan cara memberi bimbingan, penyuluhan dan keterampilan tentang bagaimana bertingkah laku dan bagaimana meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup serta kemandirian agar nantinya ketika mantan napi kembali ke masyarakat mempunyai akhlak yang baik bagi masyarakat sekitar, serta mengubah gaya hidup mantan napi menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi keluarga, pribadi dan masyarakat.</p>

				<p>2. Tingginya ikatan emosional dalam komunitas serta ketersediaan tenaga pendamping, pendanaan, kontrol dan evaluasi pertanggung jawaban dalam implementasinya.</p> <p>3. Ketergantungan modal dan bersifat proyek. Tidak bersifat jangka panjang</p>
--	--	--	--	---